

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian	12

1.7 Sistematika Penulisan	14
---------------------------------	----

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL..... 17

2.1 Landasan Teori.....	17
-------------------------	----

2.1.1 Teori Perbuatan Melawan Hukum.....	17
--	----

2.1.2 Teori Penyalahgunaan Kewenangan	26
---	----

2.2 Landasan Konseptual	33
-------------------------------	----

2.2.1 Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi	34
--	----

2.2.2 Pengertian, Peran, dan Fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	40
---	----

2.2.3 Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Pejabat Pembuat Akta Tanah	42
--	----

2.2.4 Pengertian Korupsi	53
--------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN..... 55

3.1 Jenis Penelitian.....	55
---------------------------	----

3.1.1 Penelitian Hukum Normatif.....	55
--------------------------------------	----

3.1.2 Penelitian Hukum Empiris.....	55
-------------------------------------	----

3.1.3 Penelitian Hukum Normatif Empiris.....	56
--	----

3.2 Jenis Data	57
----------------------	----

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	58
----------------------------------	----

3.4 Jenis Pendekatan	59
3.5 Sifat Analisis Data	62

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA..... 64

4.1 Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai subjek hukum dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi	64
4.1 Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Dan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara yang pelakunya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).....	74
4.1.1 Rumusan Unsur Melawan Hukum dan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	74
4.1.2 Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dan Penyalahgunaan Kewenangan Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk Jakarta.....	95
4.1.2.1 Kronologis Kasus.....	96
4.1.2.2 Putusan Hakim	105
4.1.2.3 Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/ PN.Mnk.	107

BAB V Penutup..... 125

5.1 Simpulan 125

5.2 Saran 127

DAFTAR PUSTAKA..... 128

LAMPIRAN: Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/
PN.Mnk.



